

**Riviu dan Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan III
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang**

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Nilai Realisasi Anggaran	NKO (Nilai Kinerja Organisasi)
	65,16 %	86,41 %
Saran dan Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kami menemukan terdapat beberapa IKU yang belum menyampaikan Kendala dan Upaya Perbaikan • Kami merekomendasikan agar dapat melaporkan seluruh rencana aksi di dokumen perencanaan kedalam laporan narasi • Kegiatan-Kegiatan Rencana Aksi yang dilaporkan, tetapi diluar dari dokumen perencanaan yang ditetapkan. Harus dibuat narasi alasan terjadi penambahan kegiatan • Pada IKU 1.3 Hasil Pengukuran Kinerja – Legalisasi Aset Hak Milik Transmigrasi turun nilai realisasi <p>TW II</p> <p>Adapun realisasi pelaksanaan Reforma Agraria yang masih belum mencapai target adalah Legalisasi Aset Hak Milik Transmigrasi yang baru terlaksana sebanyak 126.945 hektar dari target 0,6 juta hektar dan Redistribusi Aset Sertipikat Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan yang baru terlaksana sebesar 320.930,66 hektar dari 4,1 juta hektar.</p> <p>TW III</p> <p>Adapun realisasi pelaksanaan Reforma Agraria yang masih belum mencapai target adalah Legalisasi Aset Hak Milik Transmigrasi yang baru terlaksana sebanyak 85.375 Hektar dari target 0,6 juta Hektar atau sebesar 14,22% dan Redistribusi Aset Sertipikat tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan yang baru terlaksana sebesar 328.732,13 Hektar dari target 4,1 juta Hektar (8,02%).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada IKU 1.7 Narasi laporan kinerjanya sama seperti Periode sebelumnya • Kami merekomendasikan untuk kegiatan yang tertunda diharapkan dapat dibawa/dijelaskan/dilaporkan pada TW selanjutnya • Pada Indeks Tata Kelola, kami merekomendasikan untuk menjelaskan atau menarasikan terkait perkembangan 4 (empat) subindikator yang meliputi : (1) % ASN JP; (2) Nilai SAKIP; (3) % Pemenuhan PMPRB; dan (4) % Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Perkembangannya hingga periode TW III ini 	

Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/Sekretaris Deputi	Nilai Realisasi Anggaran	NKO (Nilai Kinerja Organisasi)	Nilai Rata-Rata Output
	62,70 %	66,16 %	77,35 %
Saran dan Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kami menemukan di beberapa IKU yang belum memuat terkait kendala dan upaya perbaikan 2. Terdapat Kegiatan rencana aksi yang mengalami perubahan, namun belum termuat narasi atau alasan terlaksana dengan perubahan itu (IKU 1.2) 3. Pada IKU 1.3 Keterangan pada Rencana Aksi ke 2 kosong 4. Pada IKU 3.1 dari 3 Rencana aksi hanya 1 rencana aksi yang dilaporkan/dinarasikan 5. Pada IKU 3.2 belum memuat tabel pelaksanaan rencana aksi 		

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan	Nilai Realisasi Anggaran	NKO (Nilai Kinerja Organisasi)	Nilai Rata-Rata Output																								
	64,77 %	74,30 %	75,4 %																								
Saran dan Rekomendasi	<p>1. Kami menyarankan untuk IKU-IKU yang memiliki periode pelaporan tahunan, pada kolom %capaian nya diberikan ket. N/A saja. Pada tabel Realisasi, dapat diisi nilai progres triwulan berjalan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Satuan</th> <th>Target Tahun 2022</th> <th>Realisasi Triwulan III</th> <th>Capaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Indikator 1.1 Persentase Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi IGT, serta penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)</td> <td>%</td> <td>85% (dari 34 Provinsi)</td> <td>82,61% (dari 34 Provinsi)</td> <td>82,61% (dari 34 Provinsi)</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Indikator 1.2 Persentase Pelaksanaan Kebijakan/Regulasi dan debottlenecking dalam penyelenggaraan Penataan Ruang (RTRWN, RTR Pualu, RTR KSN, RTRWP, RTRWK, dan RDTR) serta penyelenggaraan Pertanahan (Pengadaan Tanah, Hak Atas Tanah, Tanah Tertanar, Tanah Timbul dan Hasil Reklamasi, Bank Tanah) yang</td> <td>%</td> <td>80%</td> <td>76,57%</td> <td>76,57%</td> </tr> </tbody> </table>			No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)	I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas					1.1	Indikator 1.1 Persentase Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi IGT, serta penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	%	85% (dari 34 Provinsi)	82,61% (dari 34 Provinsi)	82,61% (dari 34 Provinsi)	1.2	Indikator 1.2 Persentase Pelaksanaan Kebijakan/Regulasi dan debottlenecking dalam penyelenggaraan Penataan Ruang (RTRWN, RTR Pualu, RTR KSN, RTRWP, RTRWK, dan RDTR) serta penyelenggaraan Pertanahan (Pengadaan Tanah, Hak Atas Tanah, Tanah Tertanar, Tanah Timbul dan Hasil Reklamasi, Bank Tanah) yang	%	80%	76,57%	76,57%
	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)																					
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang Berkualitas																										
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pelaksanaan Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi IGT, serta penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah melalui Kebijakan Satu Peta (Perpres 23/2021 dan PP 43/2021)	%	85% (dari 34 Provinsi)	82,61% (dari 34 Provinsi)	82,61% (dari 34 Provinsi)																						
1.2	Indikator 1.2 Persentase Pelaksanaan Kebijakan/Regulasi dan debottlenecking dalam penyelenggaraan Penataan Ruang (RTRWN, RTR Pualu, RTR KSN, RTRWP, RTRWK, dan RDTR) serta penyelenggaraan Pertanahan (Pengadaan Tanah, Hak Atas Tanah, Tanah Tertanar, Tanah Timbul dan Hasil Reklamasi, Bank Tanah) yang	%	80%	76,57%	76,57%																						
<p>2. Pada IKU 1.2 dan terdapat beberapa IKU lainnya masih belum memuat tentang kendala dan Upaya perbaikan</p> <p>3. Kami menyarankan untuk Kegiatan Rencana aksi yang tertunda dan digeser, agar tetap dapat dibawa pada periode pelaporan selanjutnya</p> <p>4. Kami menemukan beberapa IKU yang dilaporkan masih memuat narasi lama (Sama seperti periode sebelumnya)</p>																											

Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan	Nilai Realisasi Anggaran	NKO (Nilai Kinerja Organisasi)	Nilai Rata-Rata Output
	83,01 %	73,33 %	-
Saran dan Rekomendasi	<p>1. Kami menyarankan untuk IKU-IKU yang memiliki periode pelaporan tahunan, pada kolom %capaian nya diberikan ket. N/A saja. Pada tabel Realisasi, dapat diisi nilai progres triwulan berjalan</p> <p>2. Beberapa IKU masih belum memuat realisasi anggaran dan capaian Output</p> <p>3. Pada tabel pelaksanaan RA, harap yang dilaporkan hanya Triwulan terkait saja. Untuk triwulan-triwulan sebelumnya dapat di take off kembali</p> <p>4. Pada IKU 2.2 belum terdapat narasi progres TW III</p>		

Asisten Deputi Ketahanan, Kebencanaan, dan pemanfaatan Teknologi	Nilai Realisasi Anggaran	NKO (Nilai Kinerja Organisasi)	Nilai Rata-Rata Output
	68,68 %	83,72 %	78,3 &
Saran dan Rekomendasi	<p>1. Masih terdapat beberapa IKU yang belum memuat Kendala dan Upaya perbaikan</p> <p>2. IKU 3.2 narasi hasil pengukuran kinerja masih sama seperti pada triwulan sebelumnya</p>		

Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	Nilai Realisasi Anggaran	NKO (Nilai Kinerja Organisasi)	Nilai Rata-Rata Output
	61,74 %	79,95 %	66,67 %
Saran dan Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kami menyarankan untuk IKU-IKU yang memiliki periode pelaporan tahunan, pada kolom %capaian nya diberikan ket. N/A saja. Pada tabel Realisasi, dapat diisikan nilai progres triwulan berjalan 2. Pada IKU yang memiliki Rencana Aksi yang tertunda, kami mengharapkan untuk dapat dibawa kembali pada TW selanjutnya 3. Pada IKU 1.1 terdapat 9 RA di Perjanjian Kinerja, namun hanya 2 RA yang dilaporkan 		